

Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 10, Nomor 2 (April 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v10i2.2047

Submitted: 22 Oktober 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 11 Desember 2025

**Dari A-Politis menjadi Ekklesia Politis:  
Rekonstruksi Pendidikan Kristiani melalui Konsep  
“Gereja dan Reformasi” Eka Darmaputera**

**Judith Debora Listia Wangania**

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar

*judithwangania16@gmail.com*

**Abstract**

*This article examines the church's identity crisis in Indonesia, manifested in its apolitical stance. This problem stems from the legacy of theological dualism that separates the spiritual and secular realms, reinforced by a model of Christian education that emphasizes solely individualistic salvation. This paper attempts to reconstruct Christian education to transform it into a political ecclesia, a church with responsible prophetic awareness and involvement in the nation's public and political affairs. This study employs a literature review method, incorporating Eka Darmaputera's key concept of "Church and Reformation" (*Ecclesia Semper Reformanda*). The result indicates that Christian education needs to be radically reconstructed into a prophetic school that adopts critical pedagogy. This reconstruction demands changes to the normative curriculum, which instills ethical-political awareness, forming a community that is critical, courageous, and responsible for issues of social justice, human rights, and the integrity of creation.*

**Keywords:** caritative; critical; diakonia; pedagogy; transformative

**Abstrak**

Artikel ini membahas krisis identitas gereja di Indonesia yang terwujud dalam sikap a-politis. Permasalahan ini berakar dari warisan dualisme teologis yang memisahkan ranah spiritual dan sekuler, diperkuat oleh model Pendidikan Kristiani yang menekankan keselamatan individualistik semata. Tulisan ini berupaya merekonstruksi Pendidikan Kristiani agar bertransformasi menjadi *Ekklesia Politis*, yakni gereja yang memiliki kesadaran dan keterlibatan profetik yang bertanggung jawab dalam urusan publik dan politik negara. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan konsep kunci Eka Darmaputera “Gereja dan Reformasi” (*Ecclesia Semper Reformanda*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kristiani perlu direkonstruksi secara radikal menjadi sebuah sekolah kenabian yang mengadopsi pedagogi kritis. Rekonstruksi ini menuntut perubahan kurikulum normatif, yang mananamkan kesadaran etis-politik, membentuk umat yang kritis, berani, dan bertanggung jawab terhadap isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keutuhan ciptaan.

**Kata Kunci:** diakonia; karitatif; kritis; pedagogi; transformatif

## PENDAHULUAN

Wacana mengenai peran gereja dalam kancah politik dan sosial di Indonesia senantiasa menjadi medan dialektika yang tegang. Di satu sisi, terdapat mandat kenabian yang menuntut keterlibatan gereja dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama di tengah realitas adanya korupsi, kesenjangan ekonomi, dan isu hak asasi manusia.<sup>1</sup> Di sisi lain, dominasi teologi spiritualis dan pietistik telah melahirkan sikap a-politis di kalangan mayoritas warga gereja — sebuah kondisi pasif yang membatasi panggilan iman hanya pada dimensi ibadah dan moralitas pribadi.<sup>2</sup> Tulisan ini berargumenasi bahwa sikap a-politis ini merupakan krisis identitas gereja yang akut, dan karenanya diperlukan rekonstruksi peran Pendidikan Kristiani (selanjutnya PK) sebagai agen pembentuk kesadaran *ekklesia* politis.

Sikap a-politis ini bukanlah tanpa akar; ia justru bersemi subur dari interpretasi iman yang keliru, yang memisahkan secara diametral antara ranah “sakral” (gereja) dan “sekular” (politik dan masyarakat).<sup>3</sup>

Warga gereja cenderung dididik untuk fokus pada keselamatan personal, menjauhi hingar-bingar dunia yang dianggap kotor, sehingga kepatuhan politik diartikan sebagai ketaatan buta tanpa kritik. Konsekuensinya, gereja, sebagai institusi yang seharusnya menjadi suara kenabian bagi yang tertindas, seringkali memilih bungkam atau bahkan menjadi kaki tangan kekuasaan, alih-alih mengambil posisi sebagai komunitas yang secara kritis terlibat dalam pembangunan bangsa dan pengawasan etika publik.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, di mana politik seringkali berbalut identitas dan kepentingan pragmatis, sikap a-politis warga gereja menjadi sangat problematis. Keengganan untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam pemilihan umum, pengawasan kebijakan publik, maupun gerakan anti-korupsi telah menyumbang pada pembiaran struktur ketidakadilan terus berlangsung. Apatisme ini bukan hanya masalah spiritual, tetapi juga etika sosial dan kewarganegaraan. Ketika gereja menarik diri, ia meninggalkan ruang publik tanpa saksi etis, membiarkan di-

<sup>1</sup> Togardo Siburian, “Menilik Praktik Perpolitikan Kristen Kekinian: Refleksi PascaPilpres 2019,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 6 (2019): 152–67.

<sup>2</sup> Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.

<sup>3</sup> Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi

Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale,” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>.

<sup>4</sup> Agustina Sjelfrita Pangkey, “Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen,” *TRANSFORMATIO: Jurnal Teologi, Pendidikan, Dan Misi Integral* 2, no. 2 (2025): 133–48, <https://doi.org/10.61719/Transformatio.A2522.022>.

namika politik nasional berjalan tanpa sentuhan nilai-nilai keadilan Kerajaan Allah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, jantung permasalahan ini terletak pada arsitektur PK yang berlaku. Selama ini, PK baik di sekolah maupun di gereja (melalui kurikulum Sekolah Minggu dan Katekisis) cenderung memprioritaskan pemahaman doktrinal yang bersifat individualistik dan eskatologis. Materi yang diajarkan lebih menekankan tanggung jawab kepada Tuhan dalam hal ibadah dan moral seksual, tetapi gagal merumuskan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan dalam hal keadilan distributif, hak asasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pendidikan yang demikian melahirkan umat yang saleh secara privat namun buta secara publik.

Kondisi ini menegaskan bahwa telah terjadi disorientasi mendasar pada pemahaman tentang *Ekklesia* itu sendiri.<sup>6</sup> Secara teologis, *Ekklesia* (persekutuan orang percaya) adalah komunitas yang dipanggil keluar (*ek-kaleo*) untuk menjadi garam dan terang dunia, yang keberadaannya tidak terpisahkan dari konteks sosial dan politiknya. Ketika gereja Indonesia memilih sikap a-

politik, ia secara efektif melepaskan pangginya untuk menjadi *counter-culture* yang menantang nilai-nilai dunia yang diskriminatif dan eksploratif.<sup>7</sup> Bagi penulis, inilah krisis identitas teologis yang memerlukan peninjauan ulang yang radikal terhadap seluruh praksis gereja, dimulai dari pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan rekonstruksi epistemologis dalam PK yang mampu menggeser paradigma dari sikap *a-politis* ke kesadaran *ekklesia politis*. Rekonstruksi ini menuntut bukan sekadar penambahan materi, tetapi perombakan total cara pandang bahwa iman Kristen bersifat holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, dan ekonomi. PK harus diposisikan sebagai sekolah kenabian, yang melatih umat untuk membaca tanda-tanda zaman dan bertindak sebagai subjek sejarah yang membawa perubahan.

Dalam mencari fondasi teologis yang kokoh untuk rekonstruksi ini, pemikiran teolog kontekstual Indonesia, Eka Darmaputra, menawarkan kerangka yang sangat relevan dan mendalam. Eka Darmaputra dikenal sebagai salah satu teolog yang paling gigih menantang pandangan dualistik antara aga-

<sup>5</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

<sup>6</sup> Alvary Exan Rerung and Santi Yohanis, “Menelusuri Konsep Pemikiran John Calvin Tentang Manusia Dan Relevansinya Terhadap Transformasi Sosial,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi*

*Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 893–908, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1593>.

<sup>7</sup> Zakaria J. Ngelow, “Dari Pendeta Caleg Sampai Roma 13: Beberapa Catatan Mengenai Partisipasi Politik Kristen Di Indonesia,” in *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi*, ed. Robert Setio, Wahju S. Wibowo, and Paulus S. Widjaja (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012), 184–86.

ma dan politik, serta secara kritis terlibat dalam isu-isu kebangsaan. Karya-karyanya menjadi jembatan antara ortodoksi iman Kristen dan ortopraksis dalam kehidupan bermasarakat dan bernegara.<sup>8</sup> Eka Darmaputra, melalui teologinya, menekankan konsep Gereja sebagai Umat Allah (*People of God*) yang dipanggil untuk hidup di dalam dunia. Bagi Eka, Gereja tidak boleh mengurung diri dalam tembok-tembok spiritual; sebaliknya, ia harus menjadi *ekklesia* yang menyadari tanggung jawabnya sebagai bagian dari umat Allah yang berjuang demi keadilan di bumi.<sup>9</sup> Konsepnya tentang reformasi melampaui perbaikan internal gerejawi, melainkan menuntut reformasi total terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Eka secara eksplisit menyerukan agar gereja keluar dari zona nyaman a-politis dan memasuki gelanggang politik dengan etika kenabian.

Dengan demikian, pemikiran Eka Darmaputra mengenai Gereja dan Reformasi menjadi penawaran teoretis utama dalam tulisan ini. Konsep ini menyediakan dasar legitimasi teologis bagi PK untuk merekonstruksi kurikulumnya, dari sekadar pengajaran moral individu menjadi pembentukan kesadaran sosial-politik yang kritis. Re-

konstruksi ini berfokus pada pelatihan umat untuk memahami iman sebagai panggilan keterlibatan struktural, di mana politik diinterpretasikan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan damai sejahtera (*shalom*) bagi seluruh ciptaan, sebagaimana digagas oleh Eka.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang permasalahan apatisme gereja di Indonesia, dan urgensi rekonstruksi PK, maka tujuan utama tulisan ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana konsep Gereja dan Reformasi dari Eka Darmaputra dapat diaplikasikan secara konkret dalam merumuskan ulang tujuan, konten, dan metodologi Pendidikan Kristiani, sehingga menghasilkan umat yang memiliki kesadaran *Ekklesia Politis*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari karya-karya utama para pemikir teologi dan pendidikan (seperti Eka Darmaputra, John Stott, dan Paulo Freire), serta didukung oleh sumber lainnya. Pembahasan akan diawali dengan tinjauan kritis terhadap sikap a-politis, dilanjutkan dengan analisis konseptual pemiki-

<sup>8</sup> Eka Darmaputra, “Menuju Teologi Kontekstual Di Indonesua,” in *Konteks Berteologi Di Indonesia: Buku Penghormatan Untuk HUT Ke-70 Prof. Dr. P.D. Latuhamallo*, ed. Eka Darmaputra (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).

<sup>9</sup> Eka Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).

<sup>10</sup> Eka Darmaputra, *Iman Dan Tantangan Zaman: Kumpulan Khotbah Eka Darmaputra Tentang Isu Aktual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012).

ran Eka Darmaputra, dan diakhiri dengan model rekonstruksi peran PK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Selayang Pandang Sikap A-Politis Gereja di Indonesia

Sikap a-politis yang dipertontonkan oleh mayoritas komunitas Kristen di Indonesia merupakan sebuah pilihan teologis yang diinternalisasi dan dijustifikasi melalui dominasi paham spiritualistik dan *pietisme* yang berlebihan. Akar utama dari sikap ini adalah pandangan dualistik yang membagi realitas menjadi dua ranah yang terpisah dan tidak boleh bersentuhan: ranah iman (sakral, spiritual, kekal) dan ranah politik (sekular, duniawi, fana, dan kotor).<sup>11</sup> Dalam skema dualistik ini, keterlibatan politik dianggap mengotori kesucian iman, sehingga kesalehan diukur dari seberapa jauh seseorang atau gereja dapat menarik diri dari pusaran kekuasaan dan intrik duniawi.<sup>12</sup> Pandangan ini secara efektif telah mengebiri panggilan gereja sebagai agen transformasi sosial, membatasi panggilan *ekklesia* hanya pada keselamatan personal.

Akar historis sikap a-politis ini semakin menguat dalam konteks Indonesia,

terutama pasca-Orde Lama hingga rezim Orde Baru. Selama periode tersebut, institusi gereja sering dihadapkan pada pilihan sulit: bersuara kritis dengan risiko keamanan dan represi, atau memilih bungkam dan bersikap akomodatif demi kelangsungan ibadah dan jemaat. Trauma sejarah ini, dikombinasikan dengan interpretasi Alkitab yang menekankan ketaatan buta kepada pemerintah (Rm. 13), melahirkan budaya kehatihan berlebihan yang berevolusi menjadi apatisme.<sup>13</sup> Akibatnya, gereja kehilangan tradisi kenabiannya dan lebih memilih peran sebagai institusi sosial yang melayani secara karitatif tetapi lumpuh dalam melakukan kritik struktural terhadap ketidakadilan yang sistemik.

Manifestasi sikap a-politis di Indonesia terwujud dalam dua bentuk utama. Pertama, dalam apatisme elektoral yang masif, di mana warga gereja enggan menggunakan hak suara secara kritis, atau berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, menganggap politik sebagai “urusan orang lain.” Kedua, apatisme ini dilegitimasi oleh teologi spiritualis dan teologi kemakmuran yang sangat berfokus pada mukjizat dan berkat finansial pribadi, sambil sengaja meng-

<sup>11</sup> Yan Malino, Agus Supratikno, and Irene Ludji, “Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja Dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 684–705, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472>.

<sup>12</sup> Pangkey, “Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen.”

<sup>13</sup> Arthur Aritonang, “Kekristenan Dan Nasionalisme Di Indonesia,” *Jurnal Amanat Agung* 15, no. 1 (2019): 111–41, <https://doi.org/10.47754/jaa.v15i1.344>.

abaikan masalah struktural kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Secara teologis, apatisme ini merupakan kegagalan memahami makna Kerajaan Allah yang holistik. Ketika Kerajaan Allah hanya diartikan sebagai janji eskatologis di masa depan, maka gereja kehilangan mandatnya untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah—yaitu keadilan (*misypat*) dan kebenaran (*tsedeq*)—di masa kini. Tanpa Kerajaan Allah yang diinkarnasikan dalam praksis sosial-politik, teologi Kristen menjadi tidak relevan bagi penderitaan masyarakat.<sup>14</sup>

Dampak dari apatisme politik ini sangat signifikan dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk. Pertama, gereja gagal menjalankan fungsi kenabiannya; ia tidak lagi menjadi “penjaga di menara” yang memperingatkan bangsa tentang bahaya korupsi, radikalisme, atau ketidakadilan hukum, yang semuanya merupakan dosa struktural. Kedua, dalam kerangka politik identitas yang seringkali dominan, kegagalan gereja untuk berbicara dan bertindak secara kolektif menyebabkan suara umat Kristen—sebagai minoritas—menjadi tidak diperhitungkan dalam wacana publik.<sup>15</sup> Gereja tidak menyediakan teologi publik yang kokoh untuk menanggapi isu-isu kontemporer, sehingga kontri-

busi kekristenan terhadap etika bernegara menjadi minim dan terpinggirkan.

Kegagalan struktural ini secara langsung terkait dengan institusi Pendidikan Kristiani yang berlaku di Indonesia. PK yang *a-politis* hanya mengajarkan etika individu (misalnya, jangan berbohong, jangan mencuri), tetapi tidak pernah mengajarkan etika struktural (misalnya, mengapa sistem pemerintahan membiarkan korupsi, bagaimana cara menuntut akuntabilitas publik, atau bagaimana mengkritik kebijakan yang diskriminatif). PK yang demikian hanya melatih umat untuk menjadi individu yang baik dalam komunitasnya sendiri, tetapi gagal melatih mereka untuk menjadi warga negara yang kritis dan transformatif di tengah masyarakat luas. Hal ini menghasilkan umat yang saleh secara privat namun buta secara publik, sebuah kondisi yang dikritik oleh Paulo Freire sebagai model pendidikan yang menindas.

Kritik terhadap model PK yang menekankan aspek spiritual individu ini memerlukan landasan pedagogis yang kuat, seperti yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Freire menyoroti bahaya pendidikan yang bersifat *banking* (menabung pengetahuan), di mana siswa dianggap sebagai wadah ko-

<sup>14</sup> Alosius Des Afriando Sinuraya, “Gereja Di Ruang Publik Indonesia Berdasarkan Pemikiran A.A. Yewangoe,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 823–42, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1505>.

<sup>15</sup> Artonang, “Kekristenan Dan Nasionalisme Di Indonesia.”

song dan guru sebagai pengisi, tanpa melibatkan partisipan dalam analisis kritis terhadap realitas sosial.<sup>16</sup> Dalam konteks gereja, PK yang *banking* hanya mentransfer doktrin tanpa memicu kesadaran kritis (konsientiasi) terhadap politik dan struktur ketidakadilan. Oleh karena itu, kritik ini harus berujung pada tuntutan agar PK menghasilkan kader-kader yang sadar bahwa keterlibatan politik adalah bagian integral dari iman yang sejati, memosisikan PK sebagai sekolah kenabian yang melatih umat untuk bertindak sebagai subjek sejarah yang membawa perubahan.

### Konsep Teologi Politik Eka Darmaputra: Gereja dan Tuntutan Reformasi

Eka Darmaputra melihat gereja Indonesia yang a-politis sebagai entitas yang sakit dan perlu disembuhkan, sebuah pandangan yang mendorongnya untuk mengajukan visi Gereja yang direformasi. Menurut Eka, gereja yang otentik harus kembali pada hakikatnya sebagai komunitas pergulatan yang berani berkonfrontasi dengan isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang mengancam keutuhan ciptaan Allah dan martabat manusia. Eka menolak identitas gereja sebagai menara gading yang eksklusif, melain-

kan harus menjadi pelayan yang berinkarnasi penuh dalam konteks Indonesia. Identitas ini menuntut gereja untuk mengenali penderitaan nyata dan menjadikannya titik tolak teologis.<sup>17</sup>

Konsep Reformasi Gereja (*Ecclesia Semper Reformanda*) di tangan Eka Darmaputra diterjemahkan bukan hanya sebagai perubahan doktrinal atau liturgis, tetapi sebagai reformasi kultural dan struktural. Reformasi ini berfokus pada pengubahan cara pandang (teologis) gereja terhadap dunia dan perubahan dalam struktur pelayanan gereja agar tidak lagi bersifat internal (*inward looking*) tetapi eksternal (*outward bound*). Gereja harus direformasi dari lembaga yang memelihara dirinya sendiri menjadi gerakan yang berorientasi pada masyarakat luas dan kepentingan umum (kebaikan bersama).<sup>18</sup>

Reformasi yang esensial adalah penegasan kembali peran gereja sebagai komunitas eskatologis yang mewujudkan Kerajaan Allah secara parsial di bumi ini, dan inilah inti dari keterlibatan politiknya. Eka menentang keras interpretasi yang mereduksi Kerajaan Allah hanya sebagai janji setelah kematian, sebaliknya, Kerajaan Allah harus dipahami sebagai realitas dinamis yang menuntut keadilan (*misyapat*) dan kebenaran

<sup>16</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 2012), 50-65.

<sup>17</sup> Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra*, 9-16.

<sup>18</sup> Eka Darmaputra, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas (Tinjauan Etis Dan Budaya)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 25-32.

(*tsedeq*) di sini dan saat ini. Tugas gereja yang direformasi adalah menjadi tanda (*signum*) dan instrumen (*instrumentum*) dari Kerajaan Allah yang membebaskan.<sup>19</sup>

Eka menekankan perlunya reformasi teologis dengan menyingkirkan dualisme yang memisahkan ranah suci dan ranah sekuler. Ia berpendapat bahwa selama gereja masih menganut pemisahan ini, gereja tidak akan pernah bisa menjadi agen politik yang efektif. Reformasi menuntut gereja untuk mengakui kedaulatan Kristus atas seluruh ciptaan (*Christus Victor over all Creation*), termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Teologi yang direformasi adalah teologi yang holistik dan tidak takut untuk menyebut dosa yang terinstitusionalisasi.<sup>20</sup> Dalam konteks internal, Reformasi Gereja juga harus menargetkan liturgi dan peribadatan. Eka mengkritik peribadatan yang hanya berfokus pada emosi pribadi dan keselamatan individu, tanpa ada kaitan yang jelas dengan penderitaan dan pergulatan dunia di luar tembok gereja. Liturgi yang direformasi, menurut Eka, adalah peribadatan yang mendrong konsientisasi (kesadaran kritis) dan memotivasi jemaat untuk terlibat dalam tindakan etis-politik setelah mereka meninggalkan tempat ibadah.<sup>21</sup>

Konsep gereja yang ideal bagi Eka adalah komunitas kenabian yang harus terus menerus direformasi agar dapat menjalankan fungsi kenabian secara murni. Fungsi kenabian ini terdiri dari dua aspek: *pros* (berpihak pada yang lemah) dan *kontra* (mengkritik kekuasaan). Gereja yang direformasi tidak boleh menjadi *political lobby* yang mencari keuntungan pribadi, tetapi harus menjadi suara tanpa kekuasaan (*voice without power*) yang independen, menuntut pertanggungjawaban dari negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan.<sup>22</sup> Tantangan reformasi terberat adalah mengubah praktik diakonia gereja. Eka mendesak agar diakonia tidak lagi hanya bersifat karitatif (memberi ikan), tetapi harus bersifat transformatif dan struktural (mengajarkan cara memancing dan mengubah sistem perairan). Reformasi diakonia berarti gereja harus berani berhadapan dengan akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan (misalnya: korupsi, birokrasi yang rumit, ketidaksetaraan lahan) yang membutuhkan intervensi politik dan etis.

Hubungan gereja yang direformasi dengan Pancasila adalah hubungan etis yang mendalam. Eka menekankan bahwa reformasi gereja tidak dapat diartikan sebagai

<sup>19</sup> Darmaputra.

<sup>20</sup> Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra*, 60-72.

<sup>21</sup> Darmaputra, *Iman Dan Tantangan Zaman: Kumpulan Khotbah Eka Darmaputra Tentang Isu Aktual*.

<sup>22</sup> Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra*.

penarikan diri dari komitmen kebangsaan. Sebaliknya, gereja yang direformasi melihat Pancasila sebagai impian bersama bangsa (visi utopis) yang harus diperjuangkan. Ini berarti gereja harus terus menerus mendorong negara untuk jujur pada janji keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima. Reformasi adalah gerakan internal yang memampukan gereja untuk bertindak sebagai *conscience of the nation* di ruang publik Pancasila.<sup>23</sup> Eka juga menuntut reformasi dalam Pendidikan Kristiani di lingkungan gereja. PK yang direformasi harus berhenti memproduksi jemaat yang spiritualis-individualistik, melainkan harus menghasilkan Warga Negara Kerajaan yang memiliki kesadaran kritis-politik. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan studi Alkitab dengan analisis sosial-politik, mengubah metode pengajaran dari *banking* menjadi pendidikan pembebasan yang memberdayakan umat untuk menafsirkan Alkitab dalam terang ketidakadilan dunia.<sup>24</sup>

Kesimpulannya, bagi Eka Darmaputra, tuntutan Reformasi Gereja (*Ecclesia Semper Reformanda*) adalah prasyarat mutlak bagi keterlibatan politik yang otentik. Gereja harus bertransformasi dari Komunitas yang Pasif dan Tertutup menjadi Komunitas yang Kritis, Aktif, dan Terbuka (*Prophetic and*

*Open Community*). Tanpa reformasi teologis yang membantalkan dualisme dan reformasi struktural yang mengubah diakonia menjadi gerakan pembebasan, gereja Kristen di Indonesia akan tetap menjadi subjek yang terpinggirkan, a-politis, dan tidak relevan bagi impian keadilan bangsa.

### **Rekonstruksi Peran Pendidikan Kristiani berdasarkan Konsep Eka Darmaputra**

Analisis mendalam terhadap pemikiran Eka Darmaputra mengarahkan refleksi pada kesimpulan bahwa Pendidikan Kristiani harus menjadi mesin utama (*the primary engine*) dari tuntutan *Ecclesia Semper Reformanda* yang ia serukan. Selama ini, PK berkontribusi pada apatisme gereja dengan membatasi cakupan iman hanya pada etika pribadi dan ritualisme. Model rekonstruksi yang diimpikan Eka menuntut PK untuk diubah menjadi sekolah kenabian, di mana para peserta didik dilatih untuk menjadi agen etis-politik yang mampu menganalisis secara kritis realitas sosial dan politik Indonesia. Tanpa reformasi radikal di tingkat pendidikan, gereja akan terus mereproduksi generasi yang salah secara spiritual namun lumpuh secara sosial dan politik.

Model rekonstruksi PK ala Eka pertama-tama harus berfokus pada pembong-

<sup>23</sup> Darmaputra, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas (Tinjauan Etis Dan Budaya)*, 77-80.

<sup>24</sup> Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra*, 185-87.

karan dualisme teologis di tingkat kurikulum. PK harus mengajarkan teologi penciptaan dan inkarnasi dengan baik, yaitu menegaskan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk politik, adalah milik Allah dan berada di bawah kedaulatan Kristus. Pendekatan ini secara sadar harus mengganti narasi “melerikan diri dari dunia yang kotor” dengan narasi “mentransformasi dunia” melalui tugas imamat *am* orang percaya. Tujuan kurikulum menjadi pergeseran dari membentuk individu yang suci (spiritual) menjadi individu yang adil (sosial-politik), sehingga etika publik menjadi sama pentingnya dengan etika pribadi.

Secara pedagogis, PK yang direkonstruksi harus mengadopsi prinsip pendidikan pembebasan Paulo Freire, sebuah konsep yang sangat didukung Eka, yang ia sebut sebagai proses konsientisasi. PK harus meninggalkan metode *banking* yang pasif dan beralih ke metode pemecahan masalah (*problem-posing*) yang aktif. Peserta didik harus diajak untuk menganalisis “situasi batas” kehidupan sehari-hari (misalnya, kemiskinan di sekitar gereja, ketidakadilan pemilu) sebagai bahan studi Alkitab dan teologi. Dengan demikian, Alkitab tidak lagi menjadi buku dogma yang kering, tetapi menjadi alat hermeneutis untuk memahami dan mengubah realitas.

Selanjutnya, PK harus secara eksplisit mengintegrasikan Pancasila sebagai lokus dan visi etis. Eka melihat Pancasila sebagai impian bersama bangsa, dan PK bertanggung jawab untuk menjabarkan bagaimana nilai-nilai Kerajaan Allah terwujud dalam kelima sila, terutama Keadilan Sosial. PK tidak boleh mengajarkan Pancasila secara normatif-doktriner, tetapi secara kritis-transformasional: Pancasila sebagai tujuan yang belum tercapai (*utopian vision*) yang menuntut pergulatan politik dari umat Kristen. Dengan demikian, PK menanamkan komitmen kebangsaan yang didasarkan pada kritik etis, bukan sekadar kepatuhan buta.

Model rekonstruksi PK berfungsi sebagai sekolah pelatihan kenabian. Ini berarti PK harus melatih jemaat untuk menginternalisasi fungsi *pros* (advokasi) dan *contra* (kritik). Kurikulum harus mencakup studi kasus tentang dosa struktural, misalnya, menganalisis kasus-kasus korupsi besar atau kebijakan yang merugikan lingkungan dari sudut pandang etika Kristen. PK harus memberikan kemampuan kepada siswa untuk “berbicara kebenaran kepada kekuasaan” dengan didukung data dan analisis sosial yang kuat, bukan hanya dengan semangat keagamaan. Hal ini mengubah jemaat dari korban kebijakan menjadi kritisus dan agen perubahan yang memiliki *voice without power*.

Rekonstruksi PK juga harus mendefinisikan kembali pelajaran diakonia. PK harus mengajarkan diakonia struktural—bahwa memberi makan orang miskin (karitatif) penting, tetapi yang lebih penting adalah mencari tahu mengapa mereka miskin, dan bagaimana sistem politik serta ekonomi berkontribusi pada kemiskinan itu. Modul PK harus mencakup analisis kebijakan publik, peran *good governance*, dan tuntutan transparansi anggaran, mengubah persepsi diakonia dari sekadar amal menjadi sebuah gerakan keadilan yang menuntut reformasi sistem.

Tujuan akhir dari PK yang direkonstruksi adalah untuk melahirkan warga negara yang terlibat—yang mampu mengintegrasikan kesalehan pribadi dengan tanggung jawab publik. Warga negara ini memahami bahwa tindakan politik mereka—mulai dari memilih pemimpin hingga mengadvokasi hak-hak minoritas—adalah sebuah tindakan ibadah. PK harus menanamkan literasi politik dan literasi sosial, melatih keterampilan negosiasi, dialog antar-iman, dan advokasi damai, sehingga umat Kristen tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam demokrasi, tetapi partisipan aktif yang membawa dampak transformatif.

Implementasi PK yang direformasi menuntut perubahan dalam hermeneutika Alkitab yang diajarkan. Eka mendesak agar PK mengajarkan pembacaan Alkitab yang

kontekstual-profetik, yaitu membaca Kitab Suci dari sudut pandang kaum tertindas dan dalam terang pergulatan Indonesia. Kitab Keluaran, misalnya, harus dilihat sebagai narasi pembebasan politik, dan ajaran para nabi harus dilihat sebagai kritik terhadap ketidakadilan elit. Hermeneutika ini akan membalikkan pemahaman pasif terhadap Roma 13 (ketaatan pada pemerintah) dan mengantinya dengan penekanan pada hak dan kewajiban kenabian umat Kristen untuk menaati Allah di atas manusia.

Rekonstruksi PK juga menjadi kunci dalam mempersiapkan gereja menghadapi pluralisme dan radikalisme identitas. PK harus mengajarkan etika dialog dan keterbukaan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kurikulum harus secara aktif melibatkan studi tentang agama dan budaya lain di Indonesia, mengajarkan empati, dan mempromosikan kerja sama lintas iman dalam perjuangan politik dan sosial bersama. PK harus menjadi benteng teologis yang membongkar eksklusivisme dan fundamentalisme, mengajarkan bahwa misi Kristus adalah misi rekonsiliasi seluruh umat manusia dan kosmos.

Secara metodologis, PK harus menggeser kegiatan pengajaran dari ruang kelas ke lapangan pelayanan dan advokasi. Ini berarti tugas akhir PK dapat berupa proyek

advokasi komunitas, partisipasi dalam forum publik, atau penelitian tentang kebijakan lokal yang diskriminatif, alih-alih sekadar ujian tertulis. PK harus menjadi laboratorium untuk praktik etis-politik, di mana teori teologis langsung diuji dalam praksis sosial. Metode ini memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya dihupal (*banking*), tetapi dilakukan (aksi-refleksi-aksi).

Refleksi lebih lanjut menunjukkan bahwa PK yang direkonstruksi merupakan sistem umpan balik yang vital bagi gereja itu sendiri. Ketika PK melahirkan jemaat yang kritis, jemaat ini akan kembali menuntut gereja untuk juga direformasi, menantang kepemimpinan yang oligarkis, transparansi finansial, dan relevansi program gereja terhadap dunia luar. Dalam skema Eka, PK adalah agen internal yang memastikan *Ecclesia Semper Reformanda* tidak pernah berhenti, mencegah institusi gereja kembali terperangkap dalam dualisme yang nyaman dan mematikan.

## KESIMPULAN

Sikap a-politis Gereja Indonesia berakar pada kesalahan teologis dualistik dan hanya dapat diatasi melalui rekonstruksi peran Pendidikan Kristiani. Krisis Gereja adalah krisis pendidikan, karena PK yang lama hanya memproduksi umat yang saleh secara ritualistik namun lumpuh secara sosial dan

politik sehingga menyebabkan kegagalan fungsi kenabian dalam konteks bernegara. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Eka Darmaputra adalah pergeseran paradigma total—dari Gereja sebagai menara gading yang mengutamakan keselamatan individu, menjadi komunitas pergulatan yang mewujudkan Kerajaan Allah di muka bumi. Inti dari pergeseran ini adalah penolakan terhadap pemisahan antara yang sakral dan sekuler, serta tuntutan *Ecclesia Semper Reformanda* yang diterjemahkan menjadi reformasi struktural diakonia dan liturgi, menjadikan gereja suara etis tanpa kekuatan politik yang berpihak pada yang lemah dan mengkritik penguasa yang korup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Arthur. “Kekristenan Dan Nasionalisme Di Indonesia.” *Jurnal Amanat Agung* 15, no. 1 (2019): 111–41. <https://doi.org/10.47754/jaa.v15i1.344>.
- Darmaputra, Eka. *Iman Dan Tantangan Zaman: Kumpulan Khotbah Eka Darmaputra Tentang Isu Aktual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- . “Menuju Teologi Kontekstual Di Indonesua.” In *Konteks Berteologi Di Indonesia: Buku Penghormatan Untuk HUT Ke-70 Prof. Dr. P.D. Latuhamallo*, edited by Eka Darmaputra. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- . *Pancasila: Identitas Dan Modernitas (Tinjauan Etis Dan Budaya)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- . *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka*

- Darmaputra. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Malino, Yan, Agus Supratikno, and Irene Ludji. "Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja Dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 684–705. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472>.
- Ngelow, Zakaria J. "Dari Pendeta Caleg Sampai Roma 13: Beberapa Catatan Mengenai Partisipasi Politik Kristen Di Indonesia." In *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi*, edited by Robert Setio, Wahju S. Wibowo, and Paulus S. Widjaja. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- Pangkey, Agustina Sjelfrita. "Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen." *TRANSFORMATIO: Jurnal Teologi, Pendidikan, Dan Misi Integral* 2, no. 2 (2025): 133–48. <https://doi.org/10.61719/Transformatio.A2522.022>.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>.
- Rerung, Alvary Exan, and Santi Yohanis. "Menelusuri Konsep Pemikiran John Calvin Tentang Manusia Dan Relevansinya Terhadap Transformasi Sosial." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 893–908. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1593>.
- Siburian, Togardo. "Menilik Praktik Perpolitikan Kristen Kekinian: Refleksi PascaPilpres 2019." *Societas Dei: Jurnal Agaman Dan Masyarakat* 6 (2019): 152–67.
- Simamora, Adolf Bastian. "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia." *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sinuraya, Alosius Des Afriando. "Gereja Di Ruang Publik Indonesia Berdasarkan Pemikiran A.A. Yewangoe." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 823–42. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1505>.